

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
RINGKASAN.....	xiv
SUMMARY.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian.....	13
2. Asas-asas Perjanjian.....	16
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	21
5. Saat Terjadinya Kontrak.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi	

1.	Pengertian Prestasi.....	25
2.	Pengertian Wanprestasi.....	25
3.	Macam-macam Wanprestasi.....	26
4.	Akibat Wanprestasi.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang atau Jasa		
1.	Pengertian Barang.....	27
2.	Pengertian Jasa.....	28
3.	Prinsip-prinsip Dasar.....	28
4.	Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.....	29
5.	Bentuk Perjanjian Pengadaan Barang atau Jasa.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian.....	33
B.	Metode Pendekatan.....	33
C.	Lokasi Penelitian.....	33
D.	Jenis dan Sumber Data.....	34
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
F.	Populasi dan Sampel.....	38
G.	Teknik Analisis Data.....	39
H.	Definisi Konseptual.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk	
1.	Letak Daerah Kabupaten Nganjuk.....	41
2.	Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk.....	43

3. Penduduk Kabupaten Nganjuk.....	46
B. Gambaran Umum Tentang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk.....	47
C. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Terkait Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Berdasar Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk Dengan Swasta.....	55
1. Pengertian dan Prinsip-prinsip dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa.....	56
2. Para Pihak dalam Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa.....	60
3. Proses Pengadaan Barang atau Jasa oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk Dengan Pihak Swasta.....	68
4. Pengaturan Pemberian Sanksi Terhadap Pihak-pihak dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.....	72
5. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Terkait Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa.....	76
D. Hambatan yang Dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk terkait Pembayaran Ganti Rugi Dengan Swasta dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa.....	78

E. Upaya yang Dialakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk Untuk Mengatasi Hambatan Terkait Pembayaran Ganti Rugi Dengan Swasta Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa.....	82
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA